

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MURAH BERKUALITAS SESUAI
PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
(Studi Kasus di SMP Negeri 27 Semarang)**

Oleh :

Melati Putri, Hesti Lestari, R. Slamet Santoso

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Qualified Affordable Education Policy is a policy made by the local government of Semarang city to alleviate student is unable to prevent dropouts and improve the quality of education . The government made some efforts to achieve policy objectives . Efforts are made comprised of BOS funding, budget provision of providing education, adequacy of teachers according to their respective fields, the scholarship application are less capable, the liberation of all costs for poor students , teacher certification and others. In the implementation of low- quality implementation of education policy there are several factors that affect implementation .

This study aims to describe the implementation of low- quality education policies undertaken by the local government of Semarang city and to describe the factors that influence policy implementation . This research uses descriptive qualitative method . Data collection method used is in-depth interviews and documentation techniques .

The results of this study are the low quality of education policy implementation in 27 Junior High School of Semarang there are still things that make it optimal implementation of the policy . It is seen from the precision and accuracy of the policies that have not run optimally . Factors that affect the implementation , such as communication , resources , and bureaucratic structures are also not going well.

Keywords: *Qualified Affordable Education Policy, implementation, factors*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan berhak untuk selalu mengembangkan yang ia miliki sehingga tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman. Masyarakat Indonesia wajib mengenyam pendidikan tidak terkecuali masyarakat di kota Semarang. Akan tetapi berdasarkan data yang ada bahwa masih tingginya masyarakat yang kurang mampu di kota Semarang maka perlu adanya pendidikan murah berkualitas. Jumlah warga sangat miskin sebanyak 33 KK atau 93 jiwa, warga miskin terdapat 14.745 KK atau 46.343 jiwa (tribunnews.com, 2013). Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang. Pada pasal 33 tentang pembiayaan pendidikan dijelaskan bahwa pembiayaan untuk pendidikan akan disediakan oleh pemerintah. Yang harus diperhatikan yaitu meningkatkan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah, dengan demikian dibuatlah kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas oleh pemerintah.

Pengertian Pendidikan Murah Berkualitas (Dinas Pendidikan, 2013) adalah sebagai berikut: Murah adalah gratis biaya sekolah untuk SD, SMP Negeri, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta, bantuan Buku Paket (Kemendikbud), beasiswa, bantuan lainnya bagi siswa miskin. Berkualitas adalah Seorang pendidik (guru) harus mempunyai gelar S1 kependidikan, sertifikasi pendidik (guru), dan peningkatan kemampuan melalui diklat mapel. Kurikulum & GBPP yang dipakai juga sebaiknya kurikulum yang baru yaitu Kurikulum Nasional, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), disesuaikan dengan karakteristik daerah atau sekolah yang bersangkutan. Kesejahteraan guru juga sebaiknya diperhatikan dengan baik sehingga guru-guru tersebut mempunyai motivasi yang kuat untuk mengajar.

Kesejahteraan guru meliputi gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi untuk melanjutkan kuliah, bantuan sosial, dan penghasilan lain. Sarana dan prasarana sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah kota melalui APBD, bantuan provinsi melalui dekonsentrasi sekolah negeri dan swasta, bantuan pemerintah pusat (DAK), bantuan pihak ke tiga (3) atau Donatur. Penyelenggara pendidikan juga harus memiliki kompetensi, berdedikasi, memiliki loyalitas, memiliki keteladanan, sumberdaya manusia dan tenaga kependidikan berkualitas dan tentunya tidak korupsi. Kebijakan ini diharapkan dapat membentuk siswa menjadi siswa yang berkualitas, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan dapat membangun diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Berikut adalah survey awal yang dilakukan dilapangan untuk menganalisis biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orangtua siswa selama tiga (3) tahun pada jenjang SMP di Kota Semarang :

Tabel 1.1

Biaya Pendidikan Salah Satu Siswa Selama Tiga Tahun

Biaya lain yang harus dibayar (Study tour, perpisahan saat kelulusan)	<ul style="list-style-type: none"> • Study tour Rp 900.000,00 • Perpisahan kelulusan Rp 250.000,00
Biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sekolah (tas, sepatu, kaus kaki, seragam, buku tulis)	<ul style="list-style-type: none"> • Sepatu Rp 450.000,00 • Tas Rp 400.000,00 • Seragam Rp 200.000,00 • Kaus kaki Rp 90.000,00 • Buku tulis Rp 60.000,00
Uang saku selama tiga (3) tahun	Rp 7.200.000,00

Jumlah biaya pendidikan selama 3 tahun	Rp 9.550.000,00
---	------------------------

Sumber: Orang tua siswa, 2013.

Berdasarkan tabel biaya pendidikan selama tiga (3) tahun jenjang SMP di atas, dapat dianalisis bahwa data awal yang ditemukan dilapangan dengan dilakukannya survey awal terlihat bahwa masih besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah biaya pendidikan selama tiga tahun yaitu Rp 9.550.000,00. Apabila masih seperti ini maka akan banyak masyarakat tidak mampu yang keberatan untuk menyekolahkan anaknya.

Jika dilihat dari kualitasnya, pada survey awal yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 27 Semarang yang ditemukan oleh peneliti yaitu terdapat beberapa guru yang belum sarjana. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan
Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Status Guru				Jumlah
		GT/ PNS		GTT/ Guru Bantu		
		L	P	L	P	
1.	S3/ S2	4	2			6
2.	S1	8	24	1	1	34
3.	D-4					
4.	D3/ Sarmud	3	3			6
5.	D2	1	2			3
6.	D1		1			1
7.	SMA/ Sederajat					
Jumlah		16	32	1	1	50

Sumber: Data SMP Negeri 27 Semarang, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah ada kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas jenjang SMP namun yang terjadi dilapangan masih ada guru dengan kualifikasi yang masih kurang karena beberapa guru belum mencapai jenjang pendidikan S1. Oleh karena itu dengan melatar belakangi deskripsi diatas maka judul yang diangkat adalah Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas Sesuai Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 27 Semarang).

B. TUJUAN

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pendidikan murah berkualitas di SMP Negeri 27 Semarang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penentu dalam implementasi program pendidikan murah berkualitas di SMP Negeri 27 Semarang.

C. TEORI

Pada dasarnya definisi kebijakan mempunyai arti yang berbeda tergantung dimana penekanan yang diberikan. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2007 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila dirinci menjadi beberapa kategori, yaitu: tuntutan-tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Suatu kebijakan yang telah dibuat nantinya akan diimplementasikan dan diharapkan implementasi suatu kebijakan publik dapat berhasil sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

I. Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2008:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

Pada dasarnya ada lima ketepatan yang perlu dipahami dalam hal keefektifan implementasi suatu kebijakan, sehingga kita dapat menilai nantinya apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan efektif (Riant Nugroho, 2009: 650). Kelima ketepatan itu adalah:

1. Ketepatan Kebijakan, yang dimaksud adalah apakah kebijakan yang dibuat itu sudah tepat? Dalam hal ini ketepatan kebijakan dilihat dari:
 - a. Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excelent is the policy*.
 - b. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
 - c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Ketepatan Pelaksanaan
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/ swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. Pada ketepatan ini dilihat berdasarkan aktor –aktor pelaksanaan implementasi.
3. Ketepatan Target, dalam hal ini berkenaan dalam tiga hal:
 - a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
 - b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target

- ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan Lingkungan, dalam ketepatan ini, ada dua lingkungan yang mempengaruhi:
 - a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.
 - b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut *calista variabel eksogen*, yang terdiri atas *publik opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive instutions*, yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dan *individuals* yakni individu-individu tertentu yang memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
 5. Ketepatan Proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses, yaitu:
 - a. Policy acceptance, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa

depan, disini lain pemerintah memahami kebijakan tugas yang harus dilaksanakan.

- b. Policy adoption, disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini lain pemerintah menerima kebijakan tugas yang harus dilaksanakan.
- c. Strategic readiness, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disini lain birokrasi on the street (atau birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

II. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada model implementasi kebijakan. Berikut ini adalah model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. George Edward III (Leo Agustino, 2006: 149), terdapat empat variabel yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

I. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui terjadinya suatu aspek fenomenal sosial tertentu dan mendeskripsikan fenomena sosial tertentu. Pada penelitian deskriptif, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

II. Situs Penelitian

Peneliti mengambil lokasi atau situs penelitian pada dinas pendidikan kota Semarang dan SMP Negeri 27 Semarang.

III. Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Moeloeng 2007: 11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

IV. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang valid maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Wawancara, Dokumentasi.

V. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 246) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan murah berkualitas, bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih berjalan kurang optimal. Hal ini terlihat dari ketepatan kebijakan dan ketepatan proses yang masih dirasakan kurang optimal dalam pelaksanaannya. Terdapat juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Faktor-faktor itu adalah komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi.

B. ANALISIS

I. Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas di SMP Negeri 27 Kota Semarang

KETEPATAN KEBIJAKAN

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan murah berkualitas terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan ini. Upaya-upaya yang dilakukan terdiri dari pemberian dana BOS, pemberian anggaran penyelenggaraan pendidikan, kecukupan guru sesuai bidang masing-masing, pengajuan beasiswa kurang mampu, pembebasan segala biaya bagi siswa

miskin, sertifikasi guru dan lain-lain. Akan tetapi, upaya-upaya yang ada belum berjalan maksimal sehingga masih ada tujuan-tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Dari sisi lembaga-lembaga pembuat kebijakan, kebijakan pendidikan murah berkualitas telah dibuat oleh lembaga-lembaga yang kompeten dibidangnya dan sesuai dengan karakter kebijakan. Banyak pihak yang terkait dalam kebijakan ini.

KETEPATAN PELAKSANA

Para agen pelaksana kebijakan pendidikan murah berkualitas adalah dinas pendidikan kota, dinas pendidikan propinsi, sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, dan lainnya. Hal ini berarti sejalan dengan apa yang tertulis didalam kebijakan tersebut. Dalam ketepatan tugas pelaksana dapat diketahui bahwa agen-agen pelaksana telah menjalankan upaya-upaya kebijakan pendidikan murah berkualitas yang telah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Adanya tupoksi yang diberikan pada tiap lembaga hal itu merupakan arahan yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan adanya tupoksi yang jelas dari masing-masing lembaga maka terdapat arahan yang jelas dalam melaksanakannya.

KETEPATAN TARGET

Target penerima kebijakan ini adalah seluruh siswa sekolah negeri tanpa terkecuali. Seharusnya para penerima mengetahui adanya kebijakan ini, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak penerima kebijakan ini yang belum mengetahui akan adanya kebijakan pendidikan murah berkualitas.

KETEPATAN LINGKUNGAN

Keterkaitan antara lembaga yang satu dengan lainnya tidak mengalami permasalahan. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan murah dan berkualitas semua lembaga terkait sudah saling berkoordinasi. Masing-masing agen pelaksana sudah memiliki tupoksinya masing-masing. Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai salah satu contohnya, merupakan agen pelaksana yang menjadi pusat koordinasi antara sekolah-sekolah yang menjalankan program pendidikan murah dan berkualitas.

KETEPATAN PROSES

Kesiapan agen pelaksana kebijakan pendidikan murah dan berkualitas, ada yang sudah benar-benar memahami, tetapi ada juga yang belum memahami. Kebijakan pendidikan murah berkualitas, dalam hal ini tidak hanya biaya sekolah yang gratis saja, melainkan proses belajar mengajar yang dilakukan memiliki kualitas yang baik. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam bagi setiap agen-agen pelaksana. Jika dilihat dari kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini dapat dilihat bahwa masyarakat masih belum mengetahui tentang kebijakan tersebut, sehingga kesiapannya pun dapat dikatakan kurang. Akan tetapi masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan pendidikan murah berkualitas ini karena masyarakat tidak membayar biaya sekolah anak-anaknya.

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas

KOMUNIKASI

Komunikasi dalam kebijakan pendidikan murah berkualitas dalam segi transmisi masih terdapat hambatan dalam proses sosialisasinya. Proses sosialisasi yang dilakukan masih dirasakan belum memadai, sehingga kejelasan yang diterima oleh masyarakat tidak diterima secara menyeluruh. Akan tetapi, kebijakan ini sudah memiliki konsisten karena adanya peraturan yang jelas dan pasti yang telah dibuat.

SUMBER DAYA

Dari sisi penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakaan murah dan berkualitas masih dibutuhkan sumber daya manusia lagi. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada belum mencukupi dan sesuai dengan standard yang ada. Masih ada beberapa pelaksana kebijakan seperti guru, yang belum sesuai standard yaitu sudah memiliki jenjang pendidikan S1. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas dapat diketahui bahwa masing-masing sumber daya masih perlu peningkatan dalam memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Penyediaan sumber daya manusia tidak hanya

dilihat berdasarkan kuantitas melainkan kualitasnya. Informasi terhadap petunjuk-petunjuk pelaksanaan program ini juga perlu diberikan agar setiap agen pelaksana dan penerima program dapat mengetahui setiap info yang berkembang. Hal yang sama juga perlu ditingkatkan dalam penyediaan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan implementasi.

DISPOSISI

Pendelegasian tugas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kebijakan pendidikan murah berkualitas, Dinas Pendidikan melaksanakan program yang telah dibuat oleh pusat. Sehingga alurnya pemerintah pusat memberikan tugas kepada Dinas Pendidikan yang sudah ada petunjuk teknisnya lalu Dinas Pendidikan melaksanakan tugas itu sesuai dengan petunjuk teknis. Setelah Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan kebijakan pendidikan murah berkualitas berdasarkan petunjuk teknis yang ada, kemudian dilanjutkan Dinas Pendidikan mendelegasikan tugas kepada para kepala sekolah lalu kepala sekolah seharusnya mendelegasikan tugas kepada para guru.

STRUKTUR BIROKRASI

Terkait SOP, Dinas Pendidikan sebenarnya sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh kedua agen pelaksana kebijakan disini yaitu Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 27 Kota Semarang. Pada variabel struktur birokrasi yang masih menjadi hambatan adalah fragmentasi, dikarenakan penyaluran dana pendidikan yang menggunakan dua bank.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

I. Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada implementasi pendidikan murah berkualitas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan murah berkualitas belum berjalan optimal dalam pelaksanaannya. Kurang optimalnya implementasi kebijakan pendidikan murah

berkualitas ini disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain:

- a. Ketepatan Kebijakan
Lembaga-lembaga terkait diantaranya Dinas Pendidikan, dan sekolah. Lembaga-lembaga yang berwenang telah melakukan beberapa upaya untuk tercapainya tujuan kebijakan ini. Upaya-upaya yang diprogramkan pada dasarnya dapat mencapai tujuan kebijakan ini, akan tetapi, hal ini belum dapat dikatakan telah mencapai tujuan kebijakan, karena masih banyak program yang belum dilakukan secara maksimal oleh agen-agen pelaksana.
- b. Ketepatan Pelaksana
Lembaga pelaksana kebijakan pendidikan murah berkualitas adalah dinas pendidikan kota, dinas pendidikan propinsi, sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, dan lainnya. Para pelaksana telah menjalankan upaya-upaya kebijakan pendidikan murah berkualitas yang telah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Adanya tupoksi yang diberikan pada tiap lembaga merupakan arahan yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seperti para guru yang sudah mengajar sesuai dengan keahliannya walaupun masih ada beberapa guru yang belum sarjana.
- c. Ketepatan target
Para penerima kebijakan ini adalah seluruh siswa tanpa terkecuali sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan tidak mampu membayar uang sekolah. Namun banyak para penerima kebijakan belum mengetahui adanya kebijakan ini, yang mereka tahu hanyalah biaya sekolah gratis.
- d. Ketepatan Lingkungan
Keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan murah dan berkualitas sudah saling berkoordinasi.

Masing-masing agen pelaksana sudah memiliki tupoksinya masing-masing.

e. Ketepatan Proses

Agen pelaksana kebijakan pendidikan murah dan berkualitas ada yang sudah benar-benar memahami, tetapi ada juga yang belum memahami. Kebijakan pendidikan murah berkualitas, dalam hal ini tidak hanya biaya sekolah yang gratis saja, melainkan proses belajar mengajar yang dilakukan memiliki kualitas yang baik. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam bagi setiap agen-agen pelaksana. Masyarakat masih belum mengetahui tentang kebijakan tersebut, sehingga kesiapannya pun dapat dikatakan kurang, akan tetapi masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan pendidikan murah berkualitas ini karena masyarakat tidak membayar biaya sekolah anak-anaknya.

5.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pendidikan murah berkualitas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan murah berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini ada yang menghambat, ada pula yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan murah berkualitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Komunikasi
Komunikasi dalam kebijakan pendidikan murah berkualitas dalam segi transmisi masih menghambat dalam proses sosialisasinya. Proses sosialisasi yang dilakukan masih dirasakan belum memadai, sehingga kejelasan yang diterima oleh masyarakat tidak diterima secara menyeluruh. Dinas Pendidikan mengundang para kepala sekolah untuk mengikuti proses sosialisasi, akan tetapi setelah itu banyak kepala sekolah yang

tidak mensosialisasikan kebijakan pendidikan murah berkualitas ini kepada guru, orang tua siswa, dan siswa. Kebijakan ini sudah memiliki konsistensi karena adanya peraturan yang jelas dan pasti yang telah dibuat.

b. Sumberdaya

Terdapat beberapa komponen yang kurang baik dalam faktor sumber daya. Dari sisi penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan murah dan berkualitas masih kurang kompetensinya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada belum sesuai dengan standard yang ada, seperti yang dikatakan oleh para informan yaitu masih ada beberapa pelaksana kebijakan contohnya guru, yang belum sesuai standard yaitu belum memiliki jenjang pendidikan S1.

c. Disposisi

Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan dalam menangani kebijakan pendidikan murah berkualitas, erat kaitannya dengan bagaimana persepsi birokrat dalam menangani kebijakan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap yang diambil pelaksana kebijakan dalam menangani kebijakan pendidikan murah berkualitas cukup baik, namun dalam penyampaian informasi ke target penerima masih belum merata. Terkait dengan pendelegasian tugas telah sesuai dengan petunjuk sesuai aturan yang ada. Adanya alur proses yang telah dijelaskan dari Dinas Pendidikan kemudian diteruskan kepada sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Semarang.

d. Struktur Birokrasi

Terkait SOP, Dinas Pendidikan sebenarnya sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, apabila dilihat dari program BOS yang telah berjalan hingga saat ini dapat dilihat bahwa agen pelaksana dari Dinas Pendidikan sudah memahami SOP yang berlaku. Pada variabel struktur birokrasi yang masih menjadi hambatan adalah

fragmentasi, seperti yang dikatakan oleh informan 1 yaitu mengenai penyaluran dana pendidikan yang menggunakan dua bank sehingga seringkali membuat pencairan dana dan penyaluran dananya menjadi lama dan terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Informan 5 mengatakan mengenai cara mengajar guru yang sistemnya belum dua arah sehingga tidak jelas siswa tersebut paham tentang pelajaran yang diajarkan atau guru atau tidak.

B. SARAN

I. Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas

Dalam implementasi kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas yang belum optimal, penulis menyumbangkan sarannya sebagai berikut:

1. Terkait ketepatan kebijakan perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih maksimal oleh agen-agen pelaksana dengan cara lebih meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang sudah dilakukan agar pendidikan dapat lebih berkualitas.
2. Terkait ketepatan proses perlu dilakukan penyuluhan tersendiri oleh Dinas Pendidikan mengenai pemahaman kebijakan pendidikan murah berkualitas untuk guru-guru di seluruh SMP Negeri di Kota Semarang.

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Murah Berkualitas

Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang belum optimal, penulis menyumbangkan sarannya sebagai berikut:

1. Terkait indikator transmisi dan kejelasan pada variabel komunikasi yang masih kurang terutama mengenai penyaluran

sosialisasi yang kurang merata maka diperlukan media-media sosialisasi lain seperti rapat bulanan yang diadakan oleh sekolah untuk menyampaikan mengenai kebijakan pendidikan murah berkualitas pada orang tua siswa.

2. Terkait sumberdaya perlu peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pemerataan kualifikasi guru agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebaiknya guru yang belum sarjana diberi pelatihan atau training sehingga kualitas mengajarnya dapat seperti guru yang sudah sarjana, lebih baik lagi jika guru dapat mengajar dua arah.
3. Terkait dengan struktur birokrasi pada indikator fragmentasi diperlukan adanya peninjauan kembali kepada penyaluran dana agar lebih mempermudah agen pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Dinas pendidikan sebaiknya menegaskan bank penyalur bos ditetapkan salah satu bank saja agar saat pencairan dana ke sekolah dapat tepat waktu sehingga jelas penyalurannya dan tidak ada hambatan pada alur pencairan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Komputindo.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

NON BUKU:

<http://www.artikelbagus.com/2012/12/pentingnya-pendidikan.html>

<http://soebardjos.blogspot.com/2013/02/pendidikan-itu-penting.html>

<http://jateng.bps.go.id>

<http://tribunnews.com>

Dinas Pendidikan Kota Semarang

SMP Negeri 27 Semarang